PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS PERIKANAN

LAPORAN KINERJA 2018

JL. ANTASARI NO. 06 PUTUSSIBAU
TELP/ FAX. (0567) 21644 - KODEPOS 78711

KATA PENGANTAR

Alhamdullilah, Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban tahunan terhadap semua pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan.Selain itu Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati Kapuas Hulu dan sebagai alat umpan balik (*feed back*) untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan ke depan.

Kami menyadari LKIP yang disusun ini, belum secara sempurna menggambarkan kinerja yang ideal, namun kami terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, namun pengembangan dan penyempurnaan LKIP ini memang memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Akhirnya, kami berharap melalui LKIP ini Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dapat mengambil peran dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan "*Good Governance*" di lingkungan internal khususnya dan Pemerintah Kabupaten pada umumnya.

Putussibau, 15 Februari 2019

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Kapuas Hulu,

RONI JANUARDI, S. Sos., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650129 198603 1 009

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 melaporkan capaian kinerja (*performance result*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*). Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan kegiatan untuk memacu program prioritas dalam pembangunan perikanan, untuk menyusun laporan kinerja diperlukan suatu sistem yaitu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari indikator serta mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Dalam manajemen modern pelaporan merupakan fase terakhir yang dijadikan alat untuk evaluasi diri sendiri guna perbaikan. Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggung jawab tertentu berdasarkan pendelegasian kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas itu. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini akan dimanfaatkan oleh pemberi mandat sebagai bahan evaluasi dan oleh manajemen Dinas Perikanan akan digunakan sebagai salah satu pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam mewujudkan masyarakat perikanan yang tangguh, maju dan mandiri serta bertanggung jawab dalam iklim usaha yang kondusif di era globalisasi.

Masyarakat umum menghendaki agar pemerintah menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja yang baik, tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disisi lain setiap instansi dituntut untuk melakukan perbaikan terus menerus dan berkesinambungan sehingga pemerintah benar-benar menjalankankan praktek-praktek yang sehat, ekonomis, efisien, efektif, produktif, demokratis, adil, bertanggung jawab, transparan dan tanggap terhadap perubahan.

Dengan berorientasi kepada Rencana Strategis tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018, maka dalam tercapainya visi, misi dan sasaran serta menjalankan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan 11 (Sebelas) Program pembangunan yang meliputi 55 (Lima Puluh Lima) kegiatan. beberapa program yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan di tahun 2018, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 20 kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 2 kegiatan;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan 1 kegiatan;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 9 kegiatan;
5. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dengan 5 kegiatan;
6. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dengan 2 kegiatan;
7. Program Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPR/UP2R dan Pembudidaya dengan 1 kegiatan;
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan UPT Benih Ikan Kelansin dengan 3 kegiatan;

9. Program Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah dengan 3 Kegiatan;
10. Program Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dengan 4 Kegiatan;
11. Program Pelestarian dan Pengendalian Pengelolaan Perairan Umum Daratan dengan 4 kegiatan.

Guna membiayai pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu didukung dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 sebesar Rp. 18.935.412.330,- dimana pada akhir Desember 2018 Anggaran yang terealisasi sebesar Rp 18.523.050.508 atau sebesar 97.82 %

Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2018 menetapkan target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perikanan sebesar Rp. 250.000.000,- dengan Realisasi penerimaan yang dicapai sebesar Rp. 254.463.000 atau 101,79 % dari target PAD yang ditetapkan.

Unit Pelaksana Teknis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu yaitu: Balai Benih Ikan Kelansin dan Tempat Pelelangan Ikan yang berada di 7 (Tujuh) TPI yaitu, TPI Putussibau, Jongkong, Silat Hilir, Badau, Lanjak, Selimbau, dan Suhaid.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar dengan beraneka jenis sumberdaya perikanan yang bernilai ekonomis tinggi. Dari aspek ekonomi, kawasan danau sentarum dan sekitarnya memiliki kontribusi yang cukup signifikan, baik bagi masyarakat setempat maupun daerah sekitarnya terutama dari produksi ikan air tawar. Didaerah Danau Sentarum dan sekitarnya penduduk melakukan kegiatan perikanan terbanyak adalah penangkapan dan setelah itu budidaya terutama ikan Toman dan ikan Betutu. Potensi ikan di areal danau Sentarum sebenarnya sangat tinggi tetapi akibat meningkatnya jumlah penduduk dan mata pencaharian utama adalahmenangkap ikan maka populasi ikan di Danau Sentarum semakin lama semakin berkurang jumlahnya. Kalau tidak ada upaya yang signifikan maka dikhawatirkan dimasa datang akan terjadi kepunahan berbagai jenis ikan yang selama ini menjadi harapan penduduk sebagai mata pencahariannya.

Dibidang pelayanan administrasi pemerintahan dan teknis menunjukkan keberhasilan yang cukup baik, hal ini bisa dilihat dari tingkat pendidikan pegawai pada lingkungan Dinas Perikanan sudah banyak yang berpendidikan minimal S1 dan S2, begitu pula fasilitas kantor sudah memenuhi kelayakan kantor dengan telah ditempatinya gedung kantor Dinas Perikanan yang baru, namun tidak hanya cukup sampai disini saja peningkatan kapasitas aparatur masih terus ditingkatkan guna menunjang kinerja Dinas Perikanan.

Pada akhirnya Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu harus dipertanggungjawabkan sesuai kerangka instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dengan berbagai pertimbangan dan memperhatikan lingkungan strategis yang terus berubah, telah menetapkan VISI dan MISI sebagai berikut :

Pernyataan VISI :

"MEWUJUDKAN MASYARAKAT PERIKANAN YANG SEJAHTERA MELALUI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN YANG BERDAYA SAING, LESTARI DAN BERKELANJUTAN"

Visi tersebut dapat terwujud melalui MISI :

1. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta masyarakat perikanan lainnya;

Visi dan Misi tersebut diharapkan dapat dicapai melalui tujuan dan sasaran Dinas Perikanan, serta strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Dari hasil pengukuran indikator kinerja sasaran, maka pencapaian kinerja pada tahun 2018 dapat dikategorikan sebagai berikut :

No	Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Jumlah Indikator
1	Diatas 85	15
2	70 s/d kurang dari 85	0
3	55 s/d kurang dari 70	2
4	Kurang dari 55	2
	J u m l a h	19

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, maka Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu,

2). Meningkatkan sarana dan prasarana yang masih belum memadai untuk kelancaran kegiatan rutin,

3). Menambah anggaran yang dialokasikan ke Dinas Perikanan untuk kelancaran tugas.

Namun demikian capaian tersebut diatas dirasabelum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi selama tahun 2018. Namun setiap tahun capaian-capaian tersebut akan terus dibenahi dengan berkerja secara optimal dan efisien. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan Akuntabilitas Publik dalam rangka mewujudkan "*Good Governance*" dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. GAMBARAN UMUM 1

1. Pendahuluan 1

2. Susunan Organisasi 2

3. Tugas Pokok dan Fungsi 3

4. Sumber Daya Aparatur 10

5. Sumber Daya Keuangan 11

6. Sarana dan Prasarana 11

B. PERMASALAHAN UTAMA 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA 17

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 17

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29

A. Capaian Kinerja Organisasi 29

B. Realisasi Anggaran 42

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 45

BAB IV

PENUTUP 47

A. Kesimpulan 47

B. Upaya Pemecahan Masalah 47

LAMPIRAN – LAMPIRAN

50

LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU 50

LAMPIRAN2 : PERJANIAN KINERJA TAHUN 2018 50

LAMPIRAN3 : GALERI KEGIATAN TAHUN 2018 50

LAMPIRAN 4 : PENGUKURAN KINERJA 50

BAB I.

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Dalam pelayanan di sektor Perikanan berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dirinci berdasarkan UU, PP, Perda, Kepmen. Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanaan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

Kemudian Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Tahun 2018dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Dinas Perikanan adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun

Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian mendapat perubahan nomeklatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tanggal 7 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Bidang Perikanan.Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan Organisasi

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perikanan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang Perikanan, Pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya, penyampaian laporan secara periodik serta melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tupoksinya.

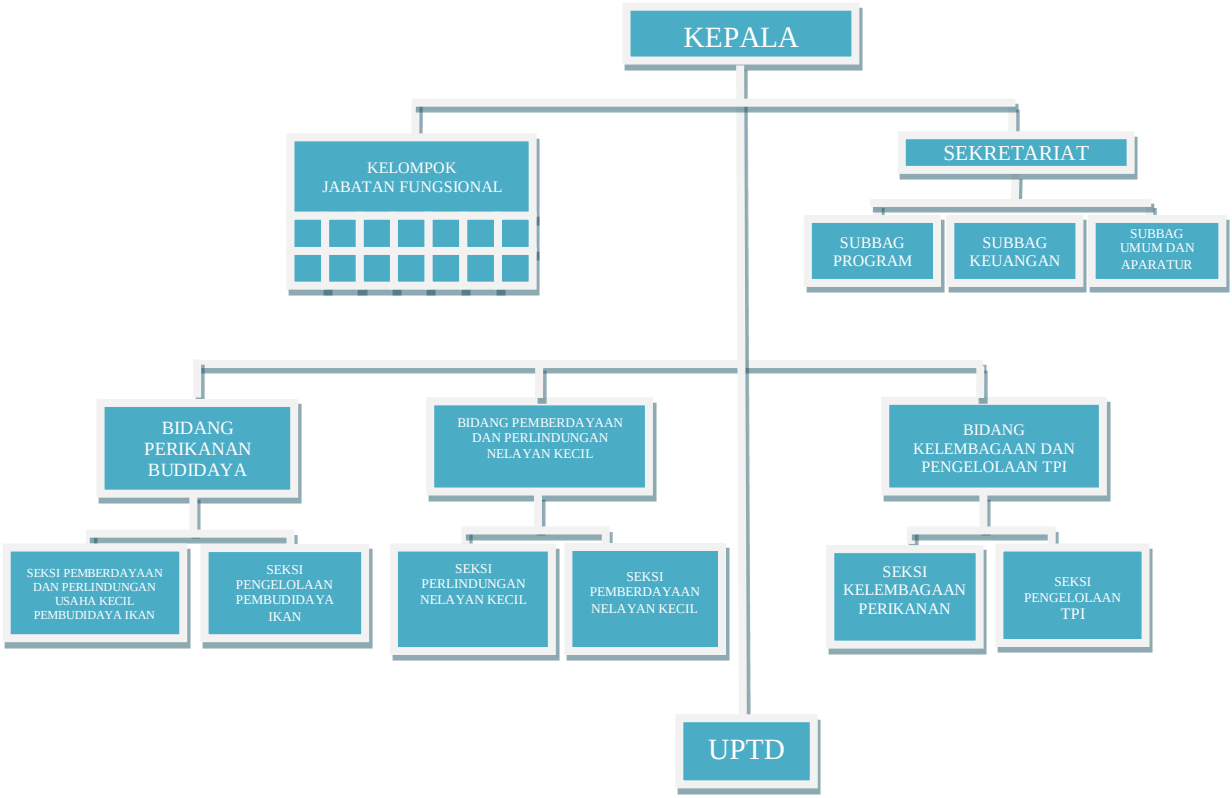

3. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018, Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan perikanan, maka Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 74 (Tujuh puluh Empat) Orang pegawai (data sampai dengan Desember 2018) dengan komposisi sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil/ CPNS dengan jumlah 33 orang.

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG				DIKLATPIM	
		S2	S1/ D4	D3	SLTA	SD/ SLTP	I	II	III	IV	SUDAH	BELUM
1	II	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	III	2	1	-	-	-	-	-	1	2	3	-
3	IV	6	1	-	3	-	-	-	10	-	9	1
	SUB JUMLAH	9	2	0	3	0	0	0	11	3	12	2
4	FUNGSIONAL	1	7	2	7	2	2	4	14	-	-	-
	TOTAL	10	9	2	10	2	2	4	24	3	-	-

b. Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak

Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dibantu oleh Pegawai tidak Tetap/Tenaga Kontrak yang berjumlah 41 Orang Terdiri dari; Tenaga Administrasi Perkantoran 14 Orang, Petugas Pengamanan Kantor 2 Orang, Petugas Kebersihan Kantor 2 Orang, Supir/Motoris 3 Orang, Petugas BBI 8 Orang, Petugas TPI 8 Orang, Petugas Biota Langka 1 Orang, dan Penyuluh Perikanan 3 Orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- SARJANA : 17 Orang
- S L T A : 23 Orang
- SLTP : 1 Orang

4. Sumber Daya Keuangan

Sumber Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2018, bersumber dari dana APBD Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dengan total dana sebesar Rp.18.935.412.330 (*Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sumber Dana Dinas Perikanan Tahun 2018

No.	Uraian	Anggaran
1	Belanja Tidak Langsung	2.957.999.000,00
	Belanja Pegawai	2.957.999.000,00
2	Belanja Langsung	15.977.413.330,00
	Belanja Pegawai	1.077.095.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	12.857.901.330,00
	Belanja Modal	2.042.417.000,00
	Jumlah	18.935.412.330,00

5. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan sampai dengan TA.2018

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
1	Tanah	10	10			
2	Instalasi PDAM/ PLN/ Telp.	4	4			
3	Bangunan :					
	a. Gedung Kantor	6	6			
	b. Rumah Dinas	4	4			
	c. Rumah Tamu (Gusest House)	1	1			
	d. Mess, Pos Penyuluh Perikanan, dll	9	9			
	e. Fasilitas umum	3	3			
	f. Pagar Halaman Kantor	1	1			
	g. Ruang Kantor dan Jalan	1	1			
	h. Rumah Packing	2	2			
	i. Pagar Keliling Instalasi Kolam	1	1			
	j. Kolam Resevoar	1	1			
4	Alat-alat Besar :					
	a. Genset	1	1			
5	Alat Angkut :					
	a. Mobil	5	5			
	b. Sepeda Motor	38	38			
	c. Speed Boat	9	9			
6	Alat Perikanan :					
	a. Tabung Oksigen	6	6			
	b. Waring	2	2			
	c. Ember Besar	6	6			
	d. Takaran benih	1	1			
	e. Mesin Pencetak Pakan	1	1			
	f. Aquarium/ Wadah Benih	77	77			
	g. Aquarium	124	124			
	h. Pompa Air	1	1			
	i. Timbangan	1	1			
	j. Microskop	1	1			
	k. Centilfulgator	1	1			
	l. Mikropipet	1	1			
	m. Freezer	2	2			
	n. Stabilizer	1	1			
	o. Mesin Potong Rumput	2	2			
	p. Sepatu Boot	11	11			
	q. DO Meter	2	2			
	r. Kantong Plastik Ikan	54	54			
	s. pH Tester	7	7			

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
7	Peralatan Meubelair :					
	a. Meja kerja	40	40			
	b. Meja Rapat (Kecil/ Besar)	14	14			
	c. Meja/ Kursi Tamu	2	2			
	d. Kursi Rapat/ Kursi Kerja	40	40			
	e. Filling Kabinet	3	3			
	f. Kursi Pertemuan	4	4			
	g. Whiteboard/ Papan tulis	4	4			
	h. Rak Buku Perpustakaan	7	7			
	i. Lemari	10	10			
	j. Lemari Arsip	11	11			
	k. Lemari Arsip Statistik	4	4			
	l. Spring Bed	6	6			
	m. Kasur Busa	28	28			
	n. Bantal Guling	24	24			
8	o. Tempat Tidur Besi	7	7			
	Peralatan Kantor :					
	a. Komputer	1	1			
	b. Laptop	30	30			
	c. DVD Eksternal	8	8			
	d. Hardisk Eksternal	3	3			
	e. Proyektor	4	4			
	f. UPS	5	5			
	g. Printer	33	33			
	h. Alat Pendingin (AC)	15	15			
	i. Kipas Angin	8	8			
	j. Brankas	1	1			
	k. Mesin Fotocopy	2	2			
	l. Catridge cadangan Canon warna	1	1			
	m. Kamera Digital + Asesoris	8	8			
	n. Handycam	1	1			
	o. GPS	6	6			
	p. Screen Tripod (Layar) 84"	4	4			
	q. Kabel (15M)&Terminal6	4	4			
	r. CCTV	2	2			
	s. Solar Home System	1	1			
	t. Roll Banner	10	10			
9	Alat-alat Studio	7	7			
10	Alat-alat Komunikasi	1	1			

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIS ISSUED*)

Adapun isu strategis dan permasalahan utama yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan fungsinya adalah sebagai berikut.

1. Rendahnya pendapatan nelayan tangkap di sektor hulu;
2. Rendahnya Pendapatan Pembudidaya di sektor hulu;
3. Rendahnya pendapatan Pelaku Usaha Perikanan di sektor Hilir (Pengumpul, Distributor, Jasa Angkatan/Logistik Ikan, Pengolah/ Pedagang ikan dan Pengolah Hasil Perikanan;
4. Rendahnya kontribusi UPR/ Pokdakan dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan komunitas;
5. Belum optimalnya kontribusi Balai Benih Dinas dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan komunitas;
6. Rendahnya Jaminan Ketersediaan pasokan ikan yang berkualitas, stabil dan hanya terjangkau pada tingkat konsumen (Rumah tangga dan unit Pengolah Hasil Ikan);
7. Berkurang bahkan menghilangnya beberapa jenis ikan endemic kualitas ekspor dana tau bernilai ekonomis tinggi, seperti ikan Arwana, Ringau, Belida dan lain-lain dari PUD.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 s.d 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin terjadi. Disamping itu RENSTRA juga memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta kebijakan, program yang realitas dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Agar Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu kedepan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Kantor Perikanan saja, melainkan juga unsur Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Kapuas Hulu, dan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya.Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2018 merupakan implementasi Rencana Strastegis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu periode tahun 2016 – 2021, yang merupakan tolak ukur pelaporan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

1. Visi

Dengan memperhatikan arah Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di atas, maka Visi Pemerintah Kabupaten Hulu tahun 2016–2021 adalah:

"MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN HARMONIS"

Visi tersebut mengandung beberapa makna sebagai berikut:

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Kapuas Hulu yang Sejahtera,mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin terpenuhi dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman, dan damai.
2. Kapuas Hulu yang Berdaya Saing, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
3. Kapuas Hulu yang Harmonis, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai , taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Dengan adanya misi, diharapkan seluruh aparat dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui tugas, fungsi, peran, program kerja Dinas Perikanan serta hasil yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Proses perumusan misi tersebut harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan kondisi serta tuntutan lingkungan.

Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi acuan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai Visi adalah sebagai berikut :

"MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN"

Misi ini bertujuan untuk Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta Meningkatnya Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial , Perlindungan perempuan dan anak . Potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan Perikanan yang merupakan mata pencaharian sekitar 80 % rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*).

Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Perumusan tujuan strategis ini dimaksudkan agar Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan stakeholders, Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada misi ke-2 berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Matrik Misi dan Tujuan

Misi		Tujuan		Indikator	
2	Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah yang Berkelanjutan	2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan	2	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, spesifik yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan Bidang-bidang yang terkait di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai. Sasaran-sasaran pembangunan 5 tahun Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Matrik Tujuan dan Sasaran

Tujuan Dinas Perikanan				Sasaran Dinas Perikanan			
Uraian		Indikator		Uraian		Indikator	
1	Mewujudkan Dinas Perikanan yang Profesional, Akuntabel, dan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	1	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	1	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola Dinas Perikanan yang baik	1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik
2	Meningkatkan kesejahteraan nelayan	1	Persentase PDRB sektor perikanan berdasarkan lapangan kerja	2	Meningkatnya pendapatan nelayan	1	Rata – rata pendapatan nelayan
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	3	Meningkatnya produksi ikan tangkap	2	Angka produksi ikan tangkap dalam ton per tahun
3	Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya	1	Nilai Tukar Pembudidaya (NTP)	4	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	1	Jumlah produksi budidaya (Ton pertahun)
4	Meningkatkan kesejahteraan pengolah	1	Peningkatan pendapatan kelompok usaha pengolahan perikanan	5	Meningkatnya konsumsi ikan per kapita	1	Jumlah konsumsi ikan kg per kapita/ tahun
		2	Nilai Tukar Pengolah Hasil (NTPe)	6	Meningkatnya ragam jenis produk yang dapat di produksi unit pengolah hasil perikanan dan omzet penjualan produk	2	Jumlah ragam jenis produk olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolah (jenis)
5	Meningkatkan kontribusi Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Pokdakan dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan Pemerintah	1	Persentase produksi bibit yang dapat disediakan dibanding keseluruhan bibit yang dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk memenuhi belanja bibit pemerintah (proyek)	7	Meningkatnya produksi benih dan pakan unit pembenihan rakyat (UPR/UP2R) dan Pembudidaya	1	Jumlah dan ragam/jenis benih ikan yang dapat di produksi
6	Meningkatkan kontribusi BBI Dinas dalam penyediaan kebutuhan bibit untuk Masyarakat dan Pemerintah	1	Presentase produksi bibit terhadap kebutuhan masyarakat dan pemerintah	8	Meningkatnya produksi dan kualitas produksi di Balai Benih	1	Jumlah produksi benih (ekor)
7	Meningkatkan jaminan ketersediaan pasokan ikan yang berkualitas dan stabil bagi rumah tangga/ konsumen dan unit pengolah hasil perikanan	1	Kenaikan ikan segar, beku dan produk olahan di tingkat konsumen stabil (tidak melebihi angka inflasi tahun berjalan berdasarkan data Bank BI)	9	Meningkatkan pasokan ikan berkualitas sesuai kebutuhan	1	Angka pasokan ikan (%)
8	Mencegah berkurangnya keberagaman ikan endemik/ berpotensi langka dari kepunahan dan meningkatkan potensi ikan di PUD	1	Jumlah keberagaman jenis ikan endemik di PUD yang tidak berkurang dari	10	Meningkatnya ekosistem danau/sungai dalam kondisi baik	1	Jumlah ekosistem sungai/ danau dalam kondisi baik

Secara terinci, target Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan perikanan yang akan dicapai tahun 2016-2021 sebagaimana tersebut pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Indikitor Kinerja Utama & Indikator Kinerja Lainnya Dinas Perikanan T.A 2017 - 2021

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	**Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan**	**-**	**-**	**B**	**B**	**BB**	**BB**	**BB**
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	0%	60%	62%	65%	70%	100%	100%
2	**Nilai Tukar Nelayan (NTN)**	**-**	**-**	**-**	**103**	**104**	**105**	**105**
	a Angka produksi ikan tangkap (Ton/Tahun)	31.495	31,550	40,050	41,000	41,200	41,600	41,600 Ton
	b Prosentase PDRB sektor perikanan berdasarkan lapangan usaha (%)	7.85	8.85	-	-	-	-	-
	c PAD sektor perikanan (juta)	120	230	240	250	260	270	270 juta
	d Rata-rata pendapatan nelayan	1,175,000	1,200,000	-	-	-	-	-
3	**Nilai Tukar Pembudidaya (NTP)**	**-**	**-**	**-**	**100**	**101**	**102**	**102**
	a Jumlah produksi ikan budidaya (Ton/tahun)	22,060	23,263	24,060	25,263	26,526	27,853	27,853 Ton
	b Jumlah kawasan budidaya yang dikembangkan (Ha)							
	- CBF	-	-	0,7	0,9	1,0	1,5	1,5 Ha
	- Minapadi	-	-	2	3	4	5	5 Ha
	- Bioplok	-	-	0,6	0,7	0,9	1,0	1,0 Ha
	- Keramba (M2)	-	209,0	219,4	230,4	241,9	254,0	254,0 M2
	- Kolam	0	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9 Ha
4	**Nilai Tukar Pengolah Ikan (NTPe)**	-	-	-	**105**	**106**	**107**	**107**
	a. Konsumsi Ikan/kapita/Kg/Tahun	37	37,5	38	0	0	0	0
	b. Ragam jenis produk olahan ikan yang sudah dapat di produksi	6	6	6	7	8	9	9 Jenis
	c. Persntase pertumbuhan penjualan produk hasil perikanan	0	0	0	3	5	6	6%
	d. Ragam jenis produk olahan yang sudah masuk/ di pasarkan di Mini Market/ Super Market	1	1	1	1	1	2	2 Jenis
	e. Cakupan ragam jenis produk olahan yang dibina melalui kegiatan : inkubasi bisnis usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	6	6	10	10	10	10	10 Jenis
	f. Ragam jenis produksi yang dipamerkan dan dibeli/dibeli	5	5	5	7	8	9	9 Jenis
	g. Keseluruhan produk yang dipamerkan	5	5	5	7	9	9	9 Produk

5	**Persentase produksi bibit yang dapat disediakan dibanding keseluruhan bibit yang dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk memenuhi belanja bibit pemerintah (proyek)**	70	70	75	80	90	100	100 %
	a. Produksi UPR							
	- Jumlah ragam/jenis benih ikan yang dapat di produksi	1	1	3	4	4	5	5 Jenis
	- Jumlah produksi (ekor)	12.000	12.100	125.000	131.250	137.813	144.703	144.703 Ekor
	- Jumlah sertifikat benih yang di dapat	0	1	2	2	4	5	13 Sertifikat
	2. Produksi benih Pembenihan Mandiri							
	- Jumlah ragam/jenis benih ikan yang dapat di produksi	0	1	3	3	3	4	4 Jenis
	- Jumlah produksi (Ekor)	2.000.000	2.010.000	2.025. 000	2.065. 500	2.106. 810	2.148. 946	2.148.946 Ekor
	Jumlah sertifikat benih yang di dapat	0	0	0	1	1	1	3 Sertifikat
	3. Produksi Pembenih Budidaya							
	- Jumlah ragam/jenis benih ikan yang dapat di produksi	0	1	1	1	2	3	3 Jenis
	- Jumlah produksi (ekor)	9.000	9.500	10.000	10.500	11.025	11.576	11.576 Ekor
	- Jumlah sertifikat benih yang di dapat	0	1	1	1	1	1	4 Sertifikat
	4. Produksi Pakan UPR							
	- Jumlah pakan yang di produksi oleh UP2R (Kg)	50	100	150	250	500	1.000	1.900 Kg
6	**Presentase produksi bibit terhadap kebutuhan masyarakat dan pemerintah**	15	18	20	31	39	47	47 %
	- Jumlah produski benih (ekor)	300.000	300.000	327.226	428.933	463.312	500.377	1.719.848 Ekor
	- Jumlah ragam/jenis ikan yang dapat di produksi	5	5	7	11	13	15	15 Jenis
	- Jumlah ragam/ jenis produksi benih yang memperoleh sertifikat	0	0	0	0	0	0	0 Jenis
	- Retribusi hasil penjualan benih (PAD)			141.450. 000	150.000. 000	165.000. 000	190.000. 000	190.000.000
7	**Kenaikan Ikan Segar, beku dari Produk Olahan lainnya di tingkat konsumen stabil serta nilai inflasi tahun berjalan berdasarkan data Bank Indonesia**	**2,88**	**2,88**	**2,88**	**2,88**	**2,88**	**2,88**	**2,88**
	a Jumlah pelaku usaha logistic ikan yang dibina (orang)							
	- Nelayan di pusatproduksi	80	85	90	95	100	105	105 Orang
	- Pembudidaya (Hulu)							
	- Pengumpul	0	150	160	170	180	190	200 Orang
	- Distributor (di pusat pengepul)	0	5	10	15	20	20	20 Orang
	- Pengangkut	10	12	14	16	18	20	20 Orang
	- Distributor Buffer Stock (pusat penyangga/ penyimpanan)	2	2	2	2	2	2	2 Orang
	- Pengecer/ pedagang ikan/ ikan olahan	50	55	60	70	75	80	80 Orang
	b Jumlah Desa dan yang tersedia data dan informasi logistic ikan	7	7	7	7	7	7	7 Desa
	c Jumlah numerator data logistic ikan yang dibina sesuai wilayah kerja (unit)	7	7	7	7	7	7	7 Unit

	e Jumlah kerjasama dalam mendukung Ketersediaan ikan di lokasi sistem logistic ikan daerah (29 – 30 kerjasama)							
	- Nelayan	0	0	0	10	10	10	30 Kerjasama
	- Pembudidaya	0	0	0	10	10	10	30 Kerjasama
	- Pengumpul	0	0	0	5	5	5	15 Kerjasama
	- Distributor pusat pengumpul	0	0	0	1	1	1	3 Kerjasama
	- Operator Angkutan	0	0	0	5	5	5	15 Kerjasama
	- Opertator Buffer Stock	0	0	0	1	1	1	3 Kerjasama
	- Pengecer/ pedagangikan/ ikanolahan	0	0	0	10	10	10	30 Kerjasama
	f Jumlah sarana dan prasarana logistik ikan yang dibangun di tingkat :							
	- Di tingkat produksi	0	5	3	1	1	1	10 Unit
	- Di tingkat pusat pengepul	0	0	0	1	1	1	1 Unit
	- Di tingkat pusat penyangga Buffer Stock	1	0	1	0	0	0	2 Unit
	- Di tingkat pengecer/pedagang	0	0	0	0	0	0	0
8	**Prosentase Peningkatan Pengelolaan Perairan Umum**	**0**	**0**	**0.133**	**0.133**	**0.1**	**0.1**	**0.10%**
	a Jumlah keberagaman jenis ikan endemik di PUD yang tidak berkurang dari	0	0	1	1	2	2	2 Jenis
	b Jumlah ikan endemik bernilai ekonomis dan langka prioritas untuk dipertahankan pada PUD (Kg)	0	0	0	900	800	650	2.350 Kg
	c Jumlah ragam jenis ikan endemic bernilai ekonomis dan langka prioritas untuk dipertahankan pada PUD (jenis)	1	1	1	3	4	5	5 Jenis
	d Jumlah unit penangkaran yang operasional (unit)	1	1	1	2	2	2	2 Unit
	e Jumlah hari operasional pengawas perikanan (hari)	72	72	72	72	72	72	72 Hari
	f Jumlah pelanggaran oleh masyarakat (kasus)	0	1	1	1	1	1	1 Kasus
	g Jumlah pelaku yang di proses (orang)	1	2	2	2	2	2	2 Orang
	h Prosentase Penurunan Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Sektor Perikanan*(Illegal, Unported and Ungregulalated Fishing)*	70	70	60	50	40	20	20 Laporan

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen kesepakatan kinerja antara Bupati Kabupaten Kapuas Hulu selaku atas dengan para Kepala SKPD selaku bawahan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut mengikat dan merupakan ukuran kinerja keberhasilan kepala SKPD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi masing –masing. Adapun perjanjian kinerja Kepala OPD tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kepala OPD Dinas Perikanan Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik	65%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan tata kelola Perikanan yang baik	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	B
3	Meningkatnya konsumsi ikan perkapita	Peningkatan Jumlah Konsumsi ikan perkapita	38 / kapita
4	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	Peningkatan Produksi Perikanan	50.835 ton
5	Meningkatnya pengelolaan dan pemulihan sumberdaya perikanan	Prosentase Peningkatan pengelolaan perairan umum	0,133 %

No	Program	Anggaran (Rp)		Ket
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	3,193,284,350.00	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	184,260,000.00	APBD
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	280,055,800.00	APBD
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	322,037,000.00	APBD
5	Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp	5,569,673,500.00	APBD (DAK)
6	Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp	2,102,485,000.00	APBD (DAK)
7	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Rp	2,358,452,500.00	APBD
8	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Rp	340,537,000.00	APBD
9	Pengembangan Data dan Informasi Perikanan	Rp	202,583,000.00	APBD
10	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Perikanan	Rp	519,530,650.00	APBD
11	Pemulihan dan Pengawasan Sumberdaya ikan perairan umum daratan	Rp	495,855,000.00	APBD
	JUMLAH	Rp	15,568,753,800.00	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Realisasi}) - \text{Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan.Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimateoutcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta

indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran sebagai berikut :

a. 85 s/d 100 ► Sangat Berhasil
b. 70 ≤ X < 85 ► Berhasil
c. 55 ≤ X < 70 ► Cukup Berhasil
d. < 55 ► Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indiokator hasil (*outcomes*). Sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya terbangun. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formuli Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 per sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	65%	60%	96,77 %
2	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola perikanan yang baik	1	Predikt SAKIP pada Dinas Perikanan	B	C	61,64 %
3	Meningkatnya konsumsi ikan per kapita	1	Peningkatan jumlah konsumsi ikan per kapita	38/ kapita	38,70/ kapita	101.84 %
4	Meningkatnya produksi dan prduktivitas perikanan kebupaten Kapuas hulu	1	Peningkatan produksi perikanan	50.835 Ton	65.780 Ton	129.40 %

5	Meningkatnya pengelolaan dan pemulihan sumber daya perikanan	1	Prosentase peningkatan pengelolaan perairan umum	0,133%	0,133%	100 %
Rata – rata Capaian Kinerja					97.93 %	

Dari 5 sasaran Pejanjian Kinerja Tahun 2018 sebanyak 4 (empat) sasaran dalam kategori Sangat Berhasil, dan 1 (satu) dalam kategori Berhasil.

Pencapaian kinerja indikator sasaran Dari 5 sasaran dan 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Indikator sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perikanan

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	Sangat Berhasil	4	100%
2	Berhasil	1	100%
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum ada nilai	-	-

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada penerima pelayanan publik.

Capaian Kinerja sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik	Persen	65	60	88,12 %
Capaian Kinerja sasaran Sangat Berhasil (100%)					

Tabel 3.4

Analisis Pencapaian Sasaran
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terselenggaranya layanan dalam bidang tata usaha, kerumahtanggaan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi persuratan dan kearsipan (%)	100	100	100	100	100	100			
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	65	60	88,12 %

Tabel 3.5

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik	100	60	60%

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2018 sebesar 88,12% dikategorikan "Sangat berhasil".Capaian meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun ke tahun sebagai berikut :

Realisasi kinerja meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2018 mencapai 60 % atau sebesar 88,12%. Realisasi kinerja tahun 2018 tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 65%.

Hal ini dikarenankan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik baru dilakukan pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2016 hingga 2017 indikator yang digunakan adalah diukur melalui indikator terselenggaranya layanan dalam bidang tata usaha, kerumahtanggaan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi persuratan dan kearsipan. Sehingga kedua indikator ini digabungkan pada tahun 2018 dengan menambahkan varibel tingkat kepuasan pelayanan di TPI milik Dinas Perikanan.

Realisasi capaian terselenggaranya layanan dalam bidang tata usaha, kerumahtanggaan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi persuratan dan kearsipan 65% sedangkan tingkat kepuasan pelayanan di TPI milik Dinas Perikanan mencapai 55,37 %. Sehingga capaian di tahun 2018 sebesar 60%.

Realisasi kinerja indikator meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2018 sebesar 60 % jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100 %, maka tingkat kemajuan indikator kinerja peningkatan produksi perikanan mencapai 60 %.

Adapun beberapa faktor pendukung pencapaian indikator peningkatan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan personil dan ketatausahaan surat menyurat diperoleh Data Surat masuk pada tahun 2018 sebanyak 749 Surat Masuk dan 520 surat keluar, sedangkan untuk kegiatan pelayanan perizinan sebanyak 12 Surat Izin Usaha Perikanan yang terdiri dari 10 SIUP izin perikanan budidaya dan 2 SIUP untuk kegiatan pengolahan hasil perikanan.
2. Terselenggaranya kegiatan survey terhadap pelayanan Tempat Penampungan Ikan (TPI) milik Dinas Perikanan Kapuas Hulu. Sebagai sampel maka dilakukan penyebaran quisioner terhadap pelaku yang memanfaatkan di salah satu TPI yakni TPI Jongkong. Survey dilakukan terhadap 15 responden untuk mewakili pelaku yang ada. Sebanyak dua kali survey dilkukan yakni semester pertama dan kedua. Pelaku tersebut terdiri dari nelayan, pengumpul maupun pengolah ikan yang memanfaatkan TPI. Hasilnya tingkat kepuasan pelayanan TPI menyatakan Cukup Memuaskan dengan nilai 55,37 %.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran-1, diantaranya adalah:

1) Keterlambatan proses pengadaan yang juga masih merupakan masalah harus di hadapi dan segera harus di atasi segera, hal ini sangat berpengaruh efiesiensi serta aktivitas kinerja, kemudian kualitas pelayanan yang diberikan oleh birokrasi kepada masyarakat.
2) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum diterapkan hingga saat ini, yang berakibat pada hasil yang di capai.

3) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, prosedur kerja masih harus disusun dan dibentuk, keterbatasan SDM yang memadai serta berbagai keterbatasan dalam mendukung manajemen kantor yang baik dan optimal. Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tetap bertekad untuk terus memenuhi keterbatasan serta kekurangan tersebut secara bertahap sejalan dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran.
4) Partisipasi masyarakat pelaku usaha perikanan dalam membuat perizinan masih tergolong rendah, hal ini berakibat pada banyak pelaku usaha perikanan yang tidak berizin, hal ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya sosialisasi perizinan yang dilakukan yang berdampak banyak ketidatahuan masyarakat mengenai izin usaha perikanan.

Berdasarkan tingkat capaian indikator Sasaran-1 tersebut, dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang data kelompok dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran "Terwujudnya Dinas Perikanan yang responsif, transparan,dan akuntabel serta terlaksananya pelayanan prima dibidang perikanan bagi masyarakat yg didukung oleh SDM Aparatur yang berkompeten, rencana kerja, penganggaran, sarana dan prasarana yang efektif dan efisien" dapat dikategorikan "Sangat Berhasil" dengan nilai rata-rata ≥ 60 yaitu sebesar 88,12 %.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencpaian sasaran 1 Antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

   Kegiatan :

   a. Penyediaan Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
   d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
   e. Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
   f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
   g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
   j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
   l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   m. Penyediaan Makanan dan Minuman
   n. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
   o. Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam
   p. Penyediaan Adminitrasi Pengadaan Barang dan Jasa

q. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan OPD
r. Penyusunan RKA dan DPA
s. Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
t. Penyediaan Jasa Publikasi

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

   Kegiatan :

   a. Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor
   b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

   Kegiatan :

   a. Pedidikan dan Pelatihan Formal

4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

   Kegiatan :

   a. Pembangunan Tempat Pelangan Ikan (TPI)
   b. Pengelolaan Tempat Pelangan Ikan (TPI)

Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Perikanan yang Baik

Sasaran "*Meningkatnya Penyelenggaraan tata kelola Perikanan yang baik"* bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunan anggaran serta peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Adapun nilai (skor) akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan evaluasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyelenggaraan SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Capaian Kinerja sasaran *"meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan"* dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	Preikat	B	C	89,34 %
Capaian Kinerja sasaran Berhasil (100%)					

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	C	C	100	CC	C	50	B	C	98,34

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	BB	C	50

Penyelenggaraan SAKIP Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 berdasarkan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi mendapat Predikat *"C"*. Realisasi kinerja Tahun 2018 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu Predikat "B" dengan capaian kinerja sebesar 98,34 % Realisasi kinerja indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang mendapat predikat "*C"* Jika dibandingkan Tahun 2017, maka predikat SAKIP Dinas Perikanan tidak mengalami perubahan peningkatan kinerja dari capaian sebelumnya yaitu *"C"*. Hal ini juga sama halnya Realisasi kinerja indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2018 yang mendapat predikat *"C"* Jika dibandingkan Tahun 2016 tidak mengalami perubahan yakni pada predikat yang sama "C".

Realisasi kinerja Tahun 2018 yang mendapat predikat *"C"* jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan predikat *"BB"*, maka tingkat kemajuan indikator kinerja Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah mencapai 50%. Keberhasilan Pencapaian kinerja indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan merupakan bentuk tanggung jawab OPD Dinas Perikanan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih bersih dan profesional dengan mewujudkan target indikator yang berorientasi hasil.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja OPD Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan reviu Rencana Strategis RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021
2. Penyusunan Cascading, Rencana Aksi serta Rencana Kerja Tahunan Bidang masing - masing;
3. Pelaksanaan pengumpulan data kinerja dilaksanakan per triwulan;

Pencapaian Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah tentunya masih terdapat beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa kendala tersebut antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas perencanaan strategis meliputi Renstra, Rencana Kerja, Cascading dan Rencana Aksi Dinas Perikanan;
2. Sebagian besar Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah belum berorientasi hasil (Outcome);
3. Capaian program belum selaras dengan IKU Kepala Dinas :
4. Belum terdapat cascading kinerja yang merupakan kinerja turunan dari pejabat diatasnya;
5. Masih kurangnya data dan infomasi pendukung sebagai dasar penyusunan pelaporan kinerja serta tindak lanjut permasalahan yang dilaporkan;
6. Masih banyak terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak berorientasi kepada pencapaian sasaran strategis;
7. Masih lemahnya pendokumentasian hasil kegiatan baik berupa data maupu dokumentasi foto dan video;

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan SAKIP di Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan reviu kembali terhadap dokumen-dokumen perencanaan Renstra Dinas Perikanan, Rencana Kerja tahunan, Cascading, Rencana Aksi, RKA dengan indikator yang akan dicapai masing – masing program dan kegiatan;
2. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam sistim penganggaran;
3. Mengoptimalkan pengumpulan data kinerja per triwulan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 2 Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Perikanan yang Baik antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

   Kegiatan :

   a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ;
   b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun ;
   c. Penyusunan Jurnal dan Buku Besar Dinas Perikanan ;
   d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ;
   e. Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD ;
   f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perikanan ;
   g. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD dan
   h. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD.

Sasaran 2 : Meningkatnya Konsumsi Ikan per Kapita

Sasaran "*Meningkatnya Konsumsi Ikan per Kapita"* bertujuan untuk meningkatkan konsumsi ikan dalam menunjang gizi masyarakat. Dalam hal ini sasaran meningkatnya konsumsi ikan per kapita pertahun mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2018 sebesar 50,8 Kg per kapita pertahun. Adapun cara mengukur konsumsi ikan per kapita dilakukan dengan pengajukan quisioner pada nelayan yang ada di beberapa Kecamatan Kapuas Hulu sebagai sampel dengan rumus dibawah ini :

$$\frac{\text{Rata – rata ikan yang dikonsumsi}}{\text{Jumlah Penduduk}} \text{ X 100 \%}$$

Capaian Kinerja sasaran *"meningkatnya konsumsi ikan per kapita"* dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Konsumsi ikan per kapita

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan konsumsi ikan per kapita	Kg/kapita	38	38.70	88,97%
Capaian Kinerja sasaran Sangat Berhasil (88,97%)					

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Peningkatan konsumsi ikan per kapita	37	37,00	100 %	37,5	37,15	99 %	38	38,70	88,97 %

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Peningkatan konsumsi ikan per kapita	0	38,70	88,,75

Capaian kinerja sasaran peningkatan konsumsi ikan per kapita Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 sebesar 88,97% dikategorikan "Sangat berhasil". Capaian peningkatan konsumsi ikan per kapita di tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi kinerja peningkatan konsumsi ikan per kapita Tahun 2018 mencapai 38,70 Kg/kapita atau sebesar 88.97%. Realisasi kinerja tahun 2018 tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 38 Kg/kapita.

Realisasi kinerja indikator peningkatan konsumsi ikan per kapita tahun 2018 sebesar 38,70 Kg/ kapita jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 37,15 Kg per kapita, maka realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1.55 Kg per kapita.

Realisasi kinerja indikator peningkatan konsumsi ikan per kapita tahun 2018 sebesar 38,70 Kg per kapita jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 37 Kg per kapita, maka realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1.7 poin.

Realisasi kinerja indikator peningkatan konsumsi ikan Kg per kapita tahun 2018 sebesar 38,70 Kg per kapita merupakan indikator yang tidak dilanjutkan pada tahun 2019 hingga akhir Renstra. Hal ini dikarenakan Dinas Perikanan memiliki program utama lainnya yang mendukung Visi dan Misi Bupati Kapuas Hulu hingga tahun 2021.

Adapun beberapa faktor pendukung pencapaian indikator peningkatan konsumsi ikan per kapita adalah sebagai berikut :

3. Beberapa kegiatan terkait meningkatkan minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan, di antaranya pada tahun 2018 tilah dilakukannya Kampanye Gemar Makan Ikan yang di ikuti 1.000 anak Sekolah Dasar yang dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2018, dengan di adakannya kegiatan tersebut pemahaman anak sejak dini mengenai penting nya mengkonsumsi ikan dapat dibentuk.
4. Faktor produksi perikanan yang maksudnya dan ketersediaan ikan yang ada, yang salah satunya pada hasil pembudidayaan ikan, terdapat pada Kecamatan-kecamatan potensi, walau pun untuk itu tidak terjadi pada Ibu kota untuk ikan komoditas spesifik lokal.

Pencapaian peningkatan konsumsi ikan per kapita tentunya masih terdapat beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa kendala tersebut antara lain :

1. Distribusi, transportasi dan pemasaran ikan terutama dari daerah-daerah yang jauh seperti sungai dan danau masih mengalami kendala.
2. Inovasi dalam hal Promosi dan sosialisasi produk-produk perikanan serta teknik pengolahannya belum berkembang pesat

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka peningkatan konsumsi ikan per kapita Kabupaten Kapuas Hulu di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyiapan Saran Transportasi yang memadai untuk mendukung distribusi pemasaran yang akan membantu sebaran produk-produk perikanan hingga mudah di dapat.
2. Perlu di lakukan beragam inovasi-inovasi terbaru dalam menarik masyarakat dalam arti penting nya mengkonsumsi ikan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencpaian sasaran 3 peningkatan konsumsi ikan Kg per kapita Antara lain :

1. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

   Kegiatan :

   a. Promosi Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah
   b. Pengembangan dan pengelolaan sistem Rantai Dingin Produk Perikanan
   c. Pengembangan dan pengelolaan sistem Logistik ikan terintegrasi
2. Program Pengembangan SDM dan Kelembagaan Perikanan

   Kegiatan :

   a. Pembinaan kelompok P2WKSS
   b. Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan)
   c. Peningkatan SDM dan kelembagaan perikanan
   d. Pekan Daerah/Pekan Nasional
   e. Fasilitasi Perizinan dan Sertifikasi Produk Hasil

f. Pemberdayaan dan Peningkatan SDM Nelayan

Sasaran 4 : Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

Sasaran "*Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu*" bertujuan untuk meningkatkan kesehateraan nelayan, pembudidaya dan pengolah perikanan. Pengukuran jumlah produksi dilakukan pada kawasan yang dibangun seperti kawasan Minapadi, Bioflok, CBF Keramba dan Kolam. Sedangkan untuk melihat produksi perikanan tangkap dilakukan survey satu data di beberapa Kecamatan. Capaian Kinerja sasaran *"Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu"* dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan produksi perikanan	Ton	50.835	65.780	103,17 %
Capaian Kinerja sasaran Sangat Berhasil (103,17%)					

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Sasaran
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Peningkatan produksi perikanan	36.180	49.417	136,6%	39.960	55.499	138,9%	50.835	65.780	103,17%

Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Peningkatan produksi perikanan	75.635	65.780	86,97%

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 sebesar 103,17% dikategorikan "Sangat berhasil". Capaian peningkatan produksi perikanan ton per tahun dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi kinerja Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 mencapai 65.780 Ton atau sebesar 103,17%. Realisasi kinerja tahun 2018 tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 14.945 Ton.

Realisasi kinerja indikator peningkatan produksi perikanan tahun 2018 sebesar 65.780 Ton jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 55.499 Ton, maka realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 10.281 Ton.

Realisasi kinerja indikator peningkatan produksi perikanan tahun 2018 sebesar 65.780 Ton jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 49.417 Ton, maka realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 16.363 Ton.

Realisasi kinerja indikator peningkatan produksi perikanan tahun 2018 sebesar 65.780 Ton jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 75.635 Ton , maka tingkat kemajuan indikator kinerja peningkatan produksi perikanan mencapai 86,97 %.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator peningkatan produksi perikanan adalah sebagai berikut :

1. Hasil survey satu data (one data) yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Penyuluh di 23 Kecamatan dengan estmasi sebesar 40.415 Ton per Desember 2018 ;
2. Terlaksanananya pengembangan kawasan budiddaya dengan sistem minapadi tahun 2018. Pembangunan minapadi ditargetkan 2 Ha, realisasi di tahun 2018 seluas 23 Ha. Adapun lokasi yang dibangun sistem minapadi antara lain :
    a. Pokdakan Jaya Murni Desa Lubuk Antuk Kacamatan Hulu Gurung seluas 1 Ha dengan jumlah ikan yang ditebar sebanyak 24.000 ekor,
    b. Pokdakan Harapan Maju II Dusun Senai Desa Tani Makmur Kecamatan Hulu Gurung seluas 1 Ha dengan jumlah ikan yang ditebar sebanyak 6.000 ekor
    c. Pokdakan Harapan Baru Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu seluas 10,425 Ha dengan jumlah ikan yang ditebar sebanyak 24.000 ekor,
    d. Pokdakan Jaya Murni Desa Lubuk Antuk Kacamatan Hulu Gurung seluas 1 Ha dengan jumlah ikan yang ditebar sebanyak 24.000 ekor,
    e. Pokdakan Harapan Jaya Desa Sungai Besar Kacamatan Bunut Hulu seluas 12,63 Ha dengan jumlah ikan yang ditebar sebanyak 252.922 ekor,
    f. Pokdakan Japari Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu seluas 7,43 Ha dengan jumlah ikan yang ditebar sebanyak 147.078 ekor,

3. Terlaksanananya pengembangan kawasan budiddaya dengan sistem Bioflok tahun 2018. Pembangunan Bioflok ditargetkan 2 Pokdakan, realisasi di tahun 2018 sebanyak 3 Pokdakan. Adapun lokasi yang dibangun sistem minapadi antara lain :
   a. Pokdakan Yayasan Pendidikan Islamic Center Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan sebanyak 10 unit dengan luas 90 m^2,
   b. Pokdakan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al – Jihad Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung sebanyak 10 unit dengan luas 90 m^2,
   c. Pokdakan Kumpulan Petani Kapuas Sejahtera Mandiri Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara sebanyak 10 unit dengn luas 90 m^2.

4. Terlaksanananya pengembangan kawasan budiddaya dengan sistem *Culture Based Fisheries* (CBF) tahun 2018. Pembangunan Bioflok ditargetkan 1 Pokdakan yakni Pokdakan Al – Hidayah Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung dengan benih ikan Biawan sebanyak 3.500 ekor dan Jelawat sebanyak 1.000 ekor,
5. Produksi benih yang dilakukan pada UPT Balai Ikan Kelansin hingga tahun 2018 mencapai 327.226 ekor per Desember 2018.
6. Hasil monitoring dan pembinaaan juga dilakukan pada daerah kawasan Budidaya keramba, kolam yang tersebar di Kapuas Hulu. Kegiatan tersebut dilakukan dengan penyuluhan cara pembenihan ikan yang baik, penanganan hama dan penyakit serta sistem panen dan pasca panen. Sebanyak 2.000 kolam yang tersebar di Kapuas Hulu dengan capaian 7.275,40 Ton (Triwulan III) dan Keramba 5.000 keramba dengan capaian produksi 18.089,60 Ton (Triwulan III). Selain ikan konsumsi juga dilakukan pembudidaya ikan hias seperti ikan arwana di 500 kolam pada 23 Kecamatan sebanyak 1.000 ekor/tahun (Red Arwana) dan 5.000 ekor/tahun (Arwana Brazil).

Pencapaian peningkatan produksi perikanan tentunya masih terdapat beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa kendala tersebut antara lain :

1. Masih terbatasnya prasarana & sarana perikanan budidaya yang menunjang produksi budidaya perikanan,
2. Produksi benih yang belum optimal dan kualitas benih ikan yang dihasilkan, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan manajemen pengelolaan induk serta peranan UPTD dan UPR dalam penyediaan induk/benih ;
3. Ketersediaan benih masih terbatas;
4. Permodalan bagi pelaku produksi perikanan;
5. Investasi terhadap usaha perikanan budidaya manih minim;
6. Harga pakan masih cukup tinggi; serta

7. Kurangnya jaminan pemasaran dan harga produksi budidaya.

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka peningkatan konsumsi ikan per kapita Kabupaten Kapuas Hulu di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya guna mendukung produksi budidaya bagi pelaku perikanan.
2. Untuk mengatasi permasalahan tingginya harga pakan, maka perlu dilakukan; (i) pengembangan teknologi inovatif untuk pakan alternative dan buatan mandiri; harapan pembudidaya dapat menekan harga lebih murah dari pada pakan pabrik; (ii) pengawasan pengadaan dan peredaran pakan/bahan baku pakan.
3. Optimalisasi unit pengolahan ikan pada sentra-sentra produksi perikanan budidaya yang sudah ada.
4. Optimalisasi fungsi dan peran fasilitas pembenihan di UPTD dalam mendukung produksi induk unggul guna mencapai pemenuhan benih berkualitas.
5. Sertifikasi Cara Berbudidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dalam rangka memenuhi ketentuan keamanan pangan.
6. Pengembangan kawasan perikanan budidaya.

   Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran 4 antara lain :

   1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

      Kegiatan :

      a. Pembinaan dan pengembangan perikanan
      b. Pengembangan sarana dan prasarana balai benih ikan
      c. Pengembangan sarana dan prasarana unit pembenihan rakyat
      d. Pengelolaan pakan, kesehatan ikan dan lingkungan ikan hias endemik
      e. Pengembangan benih/ induk ikan unggul, pakan ikan dan lingkungan UPTD BBI Kelansin
      f. Pengelolaan operasional BBI Ikan Kelansin

   2. Program pengembangan perikanan tangkap

      Kegiatan :

      a. Pembangunan tempat pelelangan ikan
      b. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
      c. Pengelolaan tempat pelelangan ikan

   3. Program Pengembangan Data dan Informasi Perikanan

      Kegiatan :

      a. Pengumpulan data dan Informasi Perikanan Budidaya, Tangkap, pengolahan

   4. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Kegiatan :

a. Pengembangan kawasan budidaya

b. Pengembangan kawasan *Culture Baesed Fisheries* (CBF)

Sasaran 9 : Meningkatnya Ekosistem Danau/Sungai Dalam Kondisi Baik

Sasaran "*Meningkatnya ekosistem danau/sungai dalam kondisi baik"* bertujuan Mencegah berkurangnya keberagaman ikan endemik/ berpotensi langka dari kepunahan dan meningkatkan potensi ikan di PUD. Adapun cara mengukur prosentase peningkatan pengelolaan perairan umum dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah luas perairan umum yang dikelola Dinas}}{\text{Luas total perairan umum}} \text{ X 100\%}$$

Capaian Kinerja sasaran *"Meningkatnya ekosistem danau/sungai dalam kondisi baik"* dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3.15
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya ekosistem danau/sungai dalam kondisi baik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Prosentase peningkatan pengelolaan perairan umum	Persen	0,133	0,133	88,43 %
Capaian Kinerja sasaran Sangat Berhasil (88,43%)					

Tabel 3.16
Analisis Pencapaian Sasaran
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Prosentase peningkatan pengelolaan perairan umum	-	-	-	-	-	-	0,133	0,133	88,43

Tabel 3.17
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Prosentase peningkatan pengelolaan perairan umum	0,10	0,133	88 %

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya ekosistem danau/sungai dalam kondisi baik Tahun 2018 sebesar 88,43% dikategorikan "Sangat berhasil".

Realisasi kinerja Meningkatnya ekosistem danau/sungai dalam kondisi baik Tahun 2018 mencapai 0,133 % atau sebesar 88.43%. Realisasi kinerja tahun 2018 tersebut sesuai target yang ditetapkan sebesar 0,133%.

Realisasi kinerja indikator prosentase peningkatan pengelolaan perairan umum tahun 2018 sebesar 0,10 % jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 0,133 %, maka tingkat kemajuan indikator kinerja meningkatnya pengelolaan pemulihan sumber daya perikanan tahun 2018 mencapai 88 %.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Prosentase peningkatan pengelolaan perairan umum adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Restoking di Danau Keliling tahun 2018 berupa ikan Red Arwana.
2. Dalam Kegiatan Patroli selama tahun 2018 tidak ditemukan aktifitas penyentruman ikan di Peraiaran Umum Daratan (PUD) Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Terciptanya upaya pencegahan aktifitas Illegal Fishing yang berdampak terhadap berkurangnya kegiatan illegal fishingyang terjadidi PUD Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Kelengkapan peran jenis ikan dalam komunitasnya di Danau Keliling dan Calon Danau Lindung Sunjung, Danau Lindung Selogan dan Pengelang relatif lengkap.
5. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan kepedulian Pemerintah dalam upaya menajaga kelestarian SDI di PUD Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Peraturan yang mengatur tentang aktivitas illegal fishing seharus nya disebar kepada masyarakat sudah diterapkan oleh kelompok masyarakat.

Pencapaian prosentase peningkatan pengelolaan perairan umum tentunya masih terdapat beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa kendala tersebut antara lain :

1. Kondisi perairan danau sedang surut terendah, hal ini menyebabkan luas perairan menjadi sempit, dangkal, dan warna air menjadi hitam, dengan bahan organik terlarut tinggi pada dasar perairan (13,81-60,13 mg/L) dari yang umumnya 0 mg/L, dimana ortofospatnya dan anonium tinggi yaitu masing-masing 0,004-0.045 mg/L dan 0,800-4.238 mg/L), dan berakibat kondisi keanekaragaman ikan yang ada menjadi rendah, karena beberapa jenis ikan (terutama ikan putihan) berupaya meninggalkan perairan danau menuju sungai induk.

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mendukung prosentase peningkatan pengelolaan perairan umum Kabupaten Kapuas Hulu di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dukungan Pemerintah dalam penyediaan benih untuk restocking di Danau Lindung;
2. Peningkatan pengawsan dari POKMASWAS yang sudah dibentuk di beberapa Danau Lindung;
3. Penetapan kawasan lindung menjadi Suaka Perikanan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran 5 antara lain :

1. Program Pemulihan dan Pengawasan Sumberdaya Ikan Perairan Umum Daratan

Kegiatan :

a. Identifikasi SDI di PUD Kabupaten Kapuas Hulu
b. Pengembangan dan Pemulihan Kawasan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan
c. Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Kaulitas Perairan Umum

B. REALISASI ANGGARAN

1. Pengelolaan Belanja Dinas

Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang Keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan Keuangan publik yang transparan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas publik dengan mendasarkan pada *'value for money'*. Disamping itu pengelolaan belanja daerah juga didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dimana belanja daerah harus berorientasi pada kinerja yang harus dicapai.Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung belanja daerah juga harus berorientasi pada kepentingan publik.

2. Target dan Realisasi Belanja

Target dan realisasi Pendapatan selama Tahun 2018 sebagaimana tercantum Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2016, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.18
Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Target	Realisasi	%
A	BELANJA TIDAK LANGSUB2:B75NG	Rp 2,957,999,000	Rp 2,947,606,780	99.65
1	Gaji dan Tunjangan	Rp 1,968,374,000	Rp 1,959,756,780	99.56
2	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 989,625,000	Rp 987,850,000	99.82
B	BELANJA LANGSUNG	Rp 15,977,413,330	Rp 15,575,443,728	97.48
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5,800,000	Rp 5,796,800	99.94
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp 119,400,000	Rp 95,665,087	80.12
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Rp 6,000,000	Rp 4,052,900	67.55
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 116,880,000	Rp 102,120,000	87.37
	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Rp 86,131,200	Rp 86,131,200	100.00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 14,500,000	Rp 14,477,700	99.85
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 63,193,000	Rp 63,193,000	100.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 29,200,000	Rp 29,198,400	99.99
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 13,020,000	Rp 13,012,500	99.94
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 83,050,000	Rp 83,050,000	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Rp 9,864,000	Rp 9,864,000	100.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 14,400,000	Rp 14,380,000	99.86
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 123,000,000	Rp 122,987,100	99.99
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 808,626,000	Rp 806,086,520	99.69
	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp 229,430,300	Rp 229,190,000	99.90
	Penyediaan Adminitrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 191,499,000	Rp 174,642,000	91.20
	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan OPD	Rp -	Rp -	
	Penyusunan RKA dan DPA	Rp 14,305,000	Rp 8,100,000	56.62
	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Rp 401,485,000	Rp 400,870,000	99.85
	Penyediaan Jasa Publikasi	Rp 7,500,000	Rp 7,500,000	100.00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Rp 81,630,000	Rp 81,286,900	99.58
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp 130,459,500	Rp 130,455,250	100.00
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp 283,175,800	Rp 154,258,600	54.47
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 6,685,000	Rp 6,635,000	99.25
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 11,870,000	Rp 11,870,000	100.00
	Penyusunan Jurnal dan Buku Besar Dinas Perikanan	Rp 9,610,000	Rp 9,610,000	100.00
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Rp 27,190,000	Rp 27,190,000	100.00
	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Rp 66,250,000	Rp 65,750,000	99.25
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perikanan	Rp 245,899,000	Rp 245,319,679	99.76

	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Rp	6,620,000	Rp	-	0.00
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Rp	2,275,000	Rp	2,230,000	98.02
5	Pengembangan Budidaya Perikanan					
	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Rp	4,612,100,000	Rp	4,604,370,000	99.83
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan	Rp	974,482,000	Rp	972,657,000	99.81
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat	Rp	5,323,000	Rp	5,241,000	98.46
	Pengelolaan Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidaya Ikan	Rp	30,903,000	Rp	30,903,000	100.00
	Pengelolaan Unit Penangkaran dan Pembudidayaan Ikan Hias Endemik	Rp	49,400,000	Rp	49,400,000	100.00
	Pengembangan Benih /Induk ikan unggul, Pakan ikan dan Lingkungan UPTD BBI Kelansin	Rp	128,957,000	Rp	108,950,000	84.49
	Pengelolaan Operasional BBI Ikan Kelansin	Rp	632,326,000	Rp	615,025,802	97.26
6	Pengembangan Perikanan Tangkap					
	Pembangunan tempat Pelelangan Ikan	Rp	1,131,844,000	Rp	1,032,278,700	91.20
	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Rp	2,063,124,200	Rp	2,055,246,500	99.62
	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	Rp	284,950,000	Rp	283,020,860	99.32
7	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan					
	Promosi Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah	Rp	65,888,000	Rp	58,402,900	88.64
	Pengembangan dan pengelolaan sistem Rantai Dingin Produk Perikanan	Rp	104,540,000	Rp	104,305,000	99.78
	Pengembangan dan pengelolaan sistem Logistik ikan terintegrasi	Rp	34,075,000	Rp	32,200,000	94.50
8	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar					
	Pengembangan Kawasan Budidaya	Rp	1,553,497,000	Rp	1,544,567,500	99.43
	Pengembangan Kawasan Culture Based Fisheries (CBF)	Rp	20,015,000	Rp	20,015,000	100.00
9	Pengembangan Data dan Informasi Perikanan					
	Pengumpulan data dan Informasi Perikanan Budidaya, Tangkap, pengolahan dan pemasaran produk perikanan	Rp	139,713,000	Rp	138,011,600	98.78
10	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Perikanan					
	Pembinaan kelompok P2WKSS	Rp	-	Rp	-	
	Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan)	Rp	120,297,450	Rp	119,299,450	99.17
	Peningkatan SDM dan kelembagaan perikanan	Rp	177,736,250	Rp	167,557,450	94.27
	Pekan Daerah/Pekan Nasional	Rp	29,613,000	Rp	29,234,500	98.72
	Fasilitasi Perizinan dan Sertifikasi Produk Hasil Perikanan	Rp	65,753,000	Rp	65,083,000	98.98
	Pemberdayaan dan Peningkatan SDM Nelayan Perikanan	Rp	30,622,750	Rp	30,242,750	98.76
11	Pemulihan dan Pengawasan Sumberdaya ikan perairan umum daratan					
	Identifikasi SDI di PUD Kabupaten Kapuas Hullu	Rp	260,840,000	Rp	255,508,200	97.96
	Pengembangan dan pemulihan kawasan Sumberdaya ikan dan lingkungan	Rp	199,775,880	Rp	197,033,380	98.63
	Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Kualitas Perairan Umum	Rp	52,690,000	Rp	51,967,500	98.63
	TOTAL BELANJA	Rp	18,935,412,330	Rp	18,523,050,508	97.82

Sumber : Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perikanan tahun 2018

3. Analisis Pengunaan Sumberdaya Keuangan

Tabel 17.
Perbandingan Realisasi Target dengan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2018

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efesiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	65%	60%	88,12 %	Rp. 2.832.548.800	Rp. 2.636.317.957	93,07 %	6.93%
2	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola perikanan yang baik	Predikt SAKIP pada Dinas Perikanan	B	C	69,34%	Rp. 376.399.000	Rp. 368.604.679	97,93 %	2,07 %
3	Meningkatnya konsumsi ikan per kapita	Peningkatan jumlah konsumsi ikan per kapita	38 Kg/kapita	38,70 Kg/kapita	88,97%	Rp. 628.525.450	Rp. 606.325.050	96,47 %	3.53 %
4	Meningkatnya produksi dan prduktivitas perikanan kebupaten Kapuas hulu	Peningkatan produksi perikanan	50.835 Ton	65.780 Ton	103,17 %	Rp. 11.626.634.200	Rp. 11.459.686.962	98,56 %	1.44 %
5	Meningkatnya pengelolaan dan pemulihan sumber daya perikanan	Prosentase peningkatan pengelolaan perairan umum	0,133%	0,133%	88,43%	Rp. 513.305.880	Rp. 504.509.080	98,29 %	1.71 %

Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik jika dibandingkan dari capaian kinerja 60 % (88,12%) dengan anggaran sebesar Rp. 2.636.317.957 (97,93%) dapat meningkatkan efesiensi anggaran sebesar 6,93%. Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola perikanan yang baik jika dibandingkan dari capaian kinerja C (69,34%) dengan anggaran sebesar Rp.368.604.679 (97,93%) dapat meningkatkan efesiensi anggaran sebesar 2,07%. Sasaran Meningkatnya konsumsi ikan per kapita jika dibandingkan dari capaian kinerja 38,70 kg/kapita/tahun (88,97%) dengan anggaran sebesar Rp. 606.325.050 (96,47%) dapat meningkatkan efesiensi anggaran sebesar 3,53%. Sasaran Meningkatnya produksi dan prduktivitas perikanan kebupaten Kapuas hulu jika dibandingkan dari capaian kinerja 65.780 Ton (103,17%) dengan anggaran sebesar Rp.11.459.686.692 (98,56%) dapat meningkatkan efesiensi anggaran sebesar 1,44%. Sasaran Meningkatnya pengelolaan dan pemulihan sumber daya perikanan jika dibandingkan dari capaian kinerja 0,133 % (88,43%) dengan anggaran sebesar Rp. 504.509.080 (98,29%) dapat meningkatkan efesiensi anggaran sebesar 1,71 %.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari LKIP Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2018 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi, dengan predikat "Sangat Berhasil", hal ini ditandai dari lima sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu telah mencapai target sasaran target yang telah ditetapkan pada Renstra. Dengan demikian, pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu yang mengacu pada Rencana Strategis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Renstra telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan Visi dan Misinya.

Secara Global hasil pembangunan perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 ditinjau dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis seluruh capaian kinerja, maka pada tahun 2018 Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan capaian kualitatif sebesar 107,10 % sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu untuk terus meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu dimasa yang akan datang terutama halnya dalam sector perikanan umum.

B. HAMBATAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, namun secara bertahap mengalami perbaikan dan peningkatan walaupun belum secara signifikan baik pelaksanaan program dan kegiatan maupun dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, hal ini disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya :

1. Sumber Daya Aparatur dan Pelaku Perikanan meliputi :
   a. Keterbatasan Tenaga terutama tenaga penyuluh dilapangan
   b. Keterbatasan Kemampuan Sumber Daya Aparatur yang belum Optimal
   c. Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan Kelompok Pembudidaya Ikan, Nelayan serta Kelompok Pengolah Hasil Perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan
   d. Inovasi untuk meningkatkan produksi masih dirasakan kurang.

2. Dukungan Sarana meliputi :
   a. Sarana Mobilitas perlu ditingkatkan secara kuantitas
3. Dukungan Permodalan dan Pemasaran Hasil Perikanan:
   a. Keterbatasan kemampuan permodalan petani Nelayan untuk mengembangkan usahanya.
   b. Terbatasnya kegiatan pemasaran dan distribusi/pengangkutan hasil-hasil perikanan.
   c. Masih belum optimal promosi atau terekspos produk perikanan baik produk budidaya maupun olahan.

Luasnya sebaran Danau lindung yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu (ada 22 danau lindung) dengan daya jangkau masih yang cukup sulit dan memerlukan alokasi dana yang cukup besar masih menjadi kendala secara teknis serta kuantitas dan kualitas SDM guna mendukung memenuhi luasnya sebaran. Guna mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan Perencanaan kegiatan lebih terarah serta tepat guna dalam menyusun Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian anggaran yang berbasis kinerja dengan tolak ukur Renstra dan standar analisa belanja serta dilengkapi pengingkatan standar pelayanan minimal.
2. Membangun, merehabilitasi serta mengoptimalisasi sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap, budidaya maupun pemasaran hasil usaha perikanan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Pemanfaatan bahan baku pakanalternatif yang murah yang mudah didapat.
4. Terus meningkatan pemberdayaan pelaku pembudidaya ikan serta nelayan melalui pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan keterampilan, penguasaan teknologi serta pengembangan kelembagaan
5. Sektor perikanan harus berorientasi pada ekspor, baik secara lokal, maupun secara nasional, hal dapat didukung melalui industrialisasi melalui komoditas utama yang ada Di Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam pengelolaannya, pola kemitraan antara industri, pemerintah dan masyarakat harus terjalin. Melalui industrialisasi, akan memberikan benih dan material lainnya untuk kemudian di budidayakan. Pemerintah juga harus berperan sebagai pembuat regulasi diantaranya dalam pengendalian harga sehingga tetap bisa bersaing di pasar luar.
6. Menambah Jumlah Pegawai di Dinas Perikanan melalui penambahan Formasi di Penerimaan CPNS Daerah, ataupun melalui penambahan tenaga kontrak untuk bidang perikanan.

7. Peningkatan kualitas sumberdaya kelembagaan serta pranata sosial di kalangan masyarakat pengelola sumberdaya ikan sehingga akses sumberdaya modal akan semakin dekat dan kuat.
8. Membangun kapasitas kelembagaan yang handal untuk mendukung kegiatan perencanaan eksplorasi dan eksploitasi serta pelestarian sumberdaya kelautan dan pengembangan basis data.
9. Terus Meningkatkan kegiatan promosi produk perikanan di berbagai kesempatan Pameran dengan harapan adanya kerjasama pemasaran atau investasi kesektor perikanan

Dalam mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu akan menempuh kebijakan pokok dan kebijakan strategis serta kebijakan operasional pembangunan yang diharapkan akan mewujudkan cita-cita luhur yaitu:

"MEWUJUDKAN MASYARAKAT PERIKANAN YANG SEJAHTERA MELALUI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN YANG BERDAYA SAING, LESTARI DAN BERKELANJUTAN"

Keberhasilan pembangunan Perikanan bergantung pada partisipasi seluruh *stakeholders* perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, maka faktor kerjasama dan koordinasi diperlukan sedini mungkin yaitu sejak tahap perencanaan yang terus dikembangkan secara serasi pada tahap pelaksanaan serta pengawasan selain itu pembangunan perikanan juga tergantung dari sistem pelaksanaan pembangunan yang *bottom up* dengan senantiasa mempertimbangkan as[pirasi dari bawah utamanya pembudidaya ikan dan nelayan sebagai obyek pembangunan perikanan kabupaten Kapuas Hulu.

Akhirnya saran dan masukan dari pihak terkait sangat kami harapkan guna penyempurnaan LAKIP ini.

Putussibau, 22 Februari 2019

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Kapuas Hulu,

RONI JANUARDI, S. Sos., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650129 198603 1 009

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU
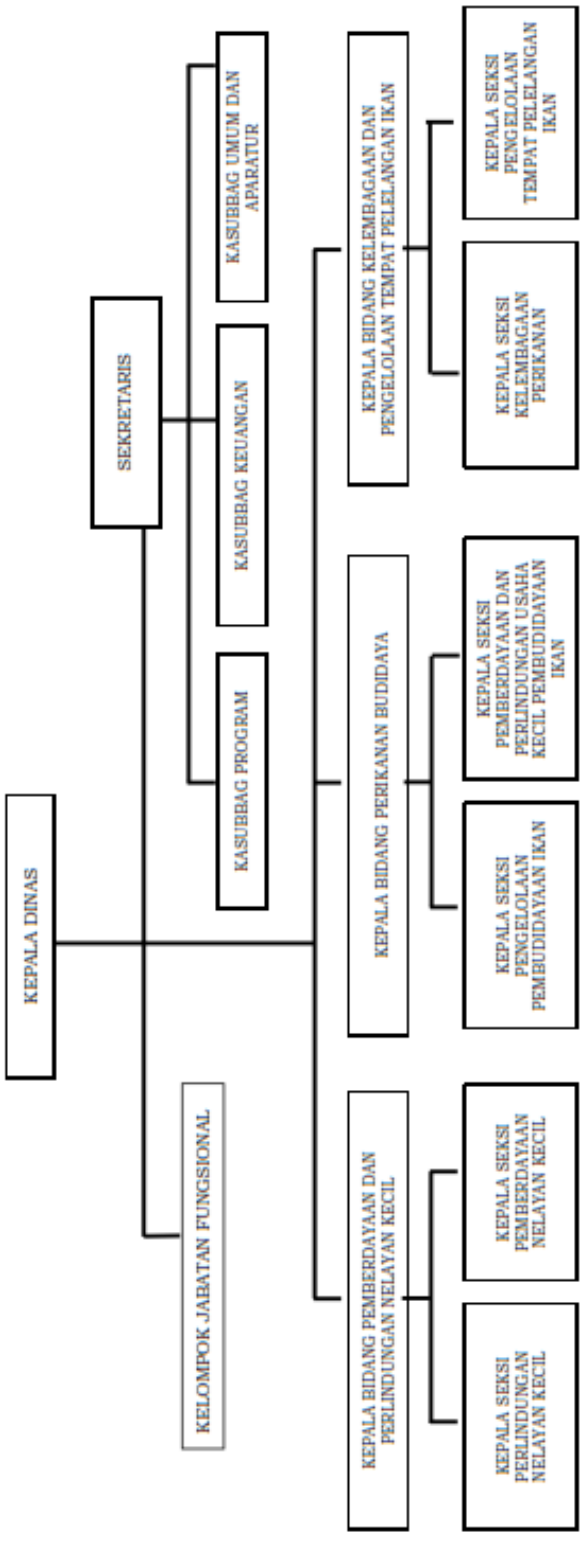
Peraturan Bupati Kapuas Hulu
Nomor : 63 Tahun 2016
Tanggal : 7 November 2016